



## GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

### **SAMBUTAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT PADA ACARA PEMBUKAAN RAKORNIS KOPERASI & UKM, KERJASAMA, PROMOSI DAN INVESTASI SE-KALIMANTAN BARAT**

Selasa, 6 Mei 2008 Jam 09.00 WIB  
Di Hotel Orchard Pontianak

Selamat pagi dan salam sejahtera.

Yang Terhormat:

- Deputi Bidang Produksi, Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM RI atau Pejabat yang mewakili;
- Deputi Pengembangan Iklim Penanaman Modal BKPM RI atau Pejabat yang mewakili;
- Dirjen Bina Bangda Depdagri atau Pejabat yang mewakili;
- Para Kepala Dinas dan Badan Provinsi Kalimantan Barat;
- Kepala Dinas/Kantor yang menangani Urusan Koperasi dan UKM, Kerjasama, Promosi dan Investasi, serta Pelayanan Terpadu Satu Pintu se-Kalimantan Barat;
- Hadirin, para peserta Rakornis dan Undangan yang saya hormati.

Mengawali sambutan ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita bersama-sama dapat berkumpul untuk menghadiri acara Rakornis, Koperasi dan UKM, Kerjasama, Promosi dan Investasi se-Kalimantan Barat. Kegiatan Rakornis ini dilaksanakan setiap tahun, sebagai sarana evaluasi kinerja serta mensinergikan atau menyinkronkan berbagai kegiatan di Bidang Koperasi dan UKM, Kerjasama Promosi dan Investasi se-Kalimantan Barat.

Pada kesempatan ini, saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Deputi Bidang Produksi, dan Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM RI, yang mewakili Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal BKPM RI, yang mewakili Dirjen Bangda Depdagri, atas kesediaannya memenuhi undangan kami. Semua ini tiada lain, adalah untuk saling mendekatkan hubungan silaturahmi, melalui dialog, guna mensinkronkan serta mensinergikan, program pembangunan yang ada di pusat dan di daerah.

Sebagai Badan yang berperan dalam membangun 2 (dua) pilar ekonomi, yaitu Koperasi dan UKM, dan Investasi di Kalimantan Barat, maka Bakomapin mempunyai tanggung jawab yang sangat besar, dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pilar Pertama yang perlu dibangun terus, adalah bidang Koperasi dan UKM. Berbicara mengenal koperasi, ada beberapa hal menarik yang dikemukakan oleh Kepala Bappenas melalui tulisannya yang bisa kita kaji, terkait dengan keberadaan koperasi.

Hadirin yang berbahagia.

Di dalam tulisan tersebut dikemukakan secara gamblang, bahwa koperasi merupakan salah satu lembaga ekonomi yang dapat menggerakkan demokrasi ekonomi. Melalui koperasi yang lebih mengutamakan kepentingan bersama, maka kesejahteraan anggota koperasi, akan dapat meningkat. Dampaknya adalah, meningkat pula kesejahteraan masyarakat.

Untuk dapat memiliki koperasi yang berperan dalam kehidupan ekonomi rakyat, maka Koperasi harus mampu berperan sebagai penyeimbang dalam kegiatan ekonomi, dan meningkatkan kualitas kehidupan berkoperasi.

Sebagai penyeimbang kekuatan ekonomi, koperasi berperan dalam mendorong munculnya ekonomi biaya rendah, dengan cara memacu efisiensi yang bersifat teknis, alokatif dan sosial. Hal ini diperlukan koperasi dalam menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat, terutama yang datangnya dari kekuatan usaha yang lebih besar, dan mendominasi dalam pasar dan harga.

Karenanya, agar dapat terus memainkan perannya, koperasi itu sendiri harus dapat meningkatkan kualitasnya, dalam kehidupan perkoperasian.

Tentunya hal ini tidak terlepas dari kebijakan yang diberikan bagi pengembangan koperasi itu sendiri. Misalnya kebijakan yang menyangkut aspek pemberian kredit. Hingga saat ini, koperasi masih ada yang mengalami kendala, dalam hal pengajuan kredit untuk mendukung permodalan mereka, antara lain agunan yang harus disertakan, suku bunga yang tinggi.

Untuk itu, salah satu upaya yang kita lakukan dalam mencerminkan keberpihakan pemerintah kepada koperasi, adalah terus memperjuangkan pembentukan Lembaga Penjamin Kredit Daerah, sebagai kekuatan yang dapat mendukung ekonomi UMKMK dengan cara memberikan bantuan, dengan persyaratan ringan dan tingkat suku bunga yang rendah.

Seandainya hal ini bisa terwujud, maka UMKMK akan mampu memperbesar nilai tambah terutama dalam meningkatkan kualitasnya.

Yang tidak kalah pentingnya untuk menjadi perhatian kita adalah, Koperasi harus berkembang sesuai dengan perkembangan jaman. Koperasi harus mampu, mengadaptasi kemajuan teknologi, sistem manajemen yang baik, dan memperhatikan setiap perubahan yang terjadi di sekitarnya.

Undangan dan peserta Rakornis yang saya hormati.

Adalah menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama untuk terus membina, mengembangkan, serta mencerdaskan KUKM dan Koperasi.

Upaya yang dapat kita lakukan antara lain, pembinaan dan pelatihan secara profesional dalam rangka mendorong pengalihan teknologi serta manajerial secara intensif, kepada pelaku koperasi.

Melalui pembinaan dan pelatihan, diharapkan koperasi akan semakin cerdas, dan pada gilirannya berdampak kepada peningkatan kualitasnya. Peningkatan "kualitas" inilah, yang menjadi kata kunci dan prioritas, dalam program pemberdayaan koperasi, yang tertuang di dalam RPJMN 2004-2009.

Oleh karena itu, untuk mencapai maksud di atas, perlu mendapat perhatian pemerintah daerah, terutama dalam rangka peningkatan dana pembinaan, yang bersumber dari APBD khususnya terhadap kegiatan UMKMK.

Pada Tahun Anggaran 2008, untuk pembinaan KUKM, telah dialokasikan dana sekitar Rp. 1 Milyar, di dalam anggaran Bakomapin Provinsi Kalimantan Barat. Apabila dibandingkan dengan jumlah KUKM di Kalimantan Barat yang berjumlah sekitar 247.753 KUKM maka dana yang dialokasikan sangat tidak memadai.

Mudah-mudahan ke depan, dana pembinaan yang bersumber dari APBD ini terus ditingkatkan seiring dengan keinginan kita, untuk lebih mencerdaskan dan meningkatkan kualitas KUKM di daerah.

Selain pembinaan dan pelatihan, ada kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan dalam rangka meningkatkan peran KUKM, antara lain seminar dan forum temu usaha. Seperti beberapa waktu yang lalu, BKPM RI, bekerjasama dengan Bakomapin Provinsi Kalimantan Barat, telah melaksanakan kegiatan *Matchmaking* Investasi, yang mempertemukan, antara pelaku usaha besar dan kecil, yang bertujuan mewujudkan hubungan kerja dan kemitraan antara usaha besar dengan UKM dan Koperasi.

Forum ini memberikan peluang, serta dorongan bagi dunia usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi, agar menjadi usaha yang lebih besar, melalui kemitraan dengan pengusaha besar nasional dan asing yang ingin bermitra dalam rangka meningkatkan kualitas investasi.

Kegiatan ini sangat penting dan berdampak positif dalam upaya peningkatan dan pembinaan UKM dan Koperasi di Kalimantan Barat. Diharapkan nantinya ada tindak lanjut nyata, dari kegiatan *Matchmaking* dimaksud.

Hadirin yang saya hormati.

Selain koperasi, pilar kedua yang perlu dibangun adalah Bidang Investasi. Sejalan dengan Misi Pembangunan saya yang ke 9, yaitu "Mengembangkan sumberdaya lokal bagi pengembangan ekonomi masyarakat, melalui sistem pengelolaan yang profesional, efektif dan efisien serta akuntabel, dengan didukung sistem dan sarana investasi yang baik, melalui penyediaan data potensi investasi, guna menarik dan mendorong masuknya investasi", maka saya mengajak dan menghimbau seluruh komponen, dimulai dari aparat provinsi, kabupaten/kota), pelaku usaha (swasta), dan masyarakat untuk bersatu membangun investasi dengan benar.

Membangun investasi yang benar, haruslah dapat memberikan manfaat kepada ketiga unsur tersebut. Oleh karena itu saya perlu menegaskan:

**Pertama**, kepada semua aparat yang menangani penanaman modal, hendaknya mampu memberikan informasi yang jelas, tentang potensi investasi di wilayahnya, baik berkaitan dengan sumberdaya alam, maupun yang berkaitan dengan rencana pembangunan infrastruktur, yang dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta (seperti pelabuhan, bandara, listrik dan sebagainya), memberikan pelayanan yang baik, dan cepat serta akurat, fasilitasi dan atau bantuan pemecahan berbagai persoalan investasi yang muncul;

**Kedua**, kepada pelaku usaha, khususnya yang sudah mengantongi semua jenis perijinan untuk memulai usaha, hendaknya segera merealisasikan kegiatan proyeknya di lapangan sehingga dampak pembangunan proyek investasi segera dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar maupun dalam mendukung program-program pemerintah. Hal ini perlu saya sampaikan, karena mulai periode jabatan saya ini dan ke depan saya ingin menjadikan "tahun-tahun realisasi bagi rencana proyek investasi". Dan oleh sebab itu bagi perusahaan-perusahaan yang telah mengantongi ijin tetapi tidak merealisasikan, saya mintakan untuk dievaluasi, dan bilamana perlu, dicabut ijinnya;

**Terakhir**, kepada anggota masyarakat, khususnya masyarakat sekitar lokasi proyek, hendaknya dapat ikut mendukung sekaligus mengamankan pembangunan proyek sepanjang kehadiran proyek-proyek investasi tersebut, telah disosialisasikan sebelumnya.

Dengan demikian, pembangunan ekonomi Kalimantan Barat yang ingin kita wujudkan, adalah pembangunan yang mengarah kepada visi saya, yaitu Terwujudnya masyarakat Kalimantan Barat yang beriman, sehat, cerdas, aman, berbudaya, dan sejahtera.

Hadirin yang Saya hormati.

Kita menyadari, menarik investor yang serius, bukanlah pekerjaan yang mudah, sementara dana investasi pemerintah relatif kecil.

Sebagai gambaran, pada Tahun 2006 dana investasi yang berasal dan PMDN, adalah sekitar Rp. 4,1 Trilyun, dari PMA sebesar US\$ 627,992, sedangkan dari pemerintah hanya senilai Rp.1,754 Trilyun. Pada tahun 2007, dana investasi PMDN menjadi sebesar Rp. 4,579 trilyun, dana PMA senilai US\$ 725,441, dan Pemerintah sebesar Rp.1,08 Trilyun.

Dari gambaran di atas, kondisi yang kita hadapi adalah masih tingginya tingkat pengangguran, di mana pada tahun 2007 berjumlah 138,796 jiwa (7.08 %), dan laju pertumbuhan ekonomi per September 2007 sebesar 5,58 %, serta tingkat inflasi 2007 sebesar 8,56 %.

Sementara itu, target-target yang harus kita capai tiap tahunnya, haruslah dapat memperbaiki kondisi tingkat pengangguran, laju pertumbuhan ekonomi, maupun menekan tingkat inflasi.

Oleh sebab itu, tidak ada jalan lain komposisi anggaran APBD, untuk menghidupkan sektor riil "perlu diperbesar.

Hadirin yang saya hormati.

Seiring dengan Inpres Nomor 3 tahun 2006, tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi, memang beberapa tindakan telah dikeluarkan oleh Pemerintah, seperti UU Penanaman Modal Nomor 25 tahun 2007, Perpres RI Nomor 111 tahun 2007 tentang Bidang Usaha Yang Tertutup dan Terbuka, dengan persyaratan untuk Penanaman Modal, PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 dan lain-lain.

Akan tetapi, dari beberapa tindakan tersebut, masih ada yang belum dikeluarkan aturan pelaksanaannya. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, perlu kiranya saya kemukakan kepada, Depdagri dan BKPM beberapa permasalahan yang dihadapi oleh daerah:

1. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu:

Sesuai dengan Permendagri Nomor 24 Tahun 2006, Pemerintah Provinsi diberikan tugas antara lain untuk mensosialisasikan, mengkoordinasikan, dan memfasilitasi pembentukan perangkat kerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), di tingkat kabupaten/kota.

Tugas ini telah kita laksanakan dengan telah dikeluarkannya Perda PTSP ini di 3 kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Sanggau, Ketapang, dan Melawi. Sedangkan 6 kabupaten/kota masih dalam bentuk Draft Perda, serta 5 Kabupaten lainnya masih dalam taraf persiapan. Ada beberapa kendala yang dihadapi daerah berkenaan dengan PTSP, antara lain:

- a. PP 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan PP 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, baru diterbitkan tahun 2007, sementara Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah baru diterbitkan pada bulan Maret 2008, melalui Permendagri Nomor 20 Tahun 2008, sehingga mempengaruhi waktu pelaksanaannya di daerah;
- b. Perpres tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana diamanatkan dalam UU Penanaman Modal, sampai saat ini belum dikeluarkan, demikian juga dengan pelimpahan kewenangan atas urusan Penanaman Modal, sebagaimana yang tertuang dalam PP No. 38 Tahun 2007, belum ditindaklanjuti oleh BKPM.

## 2. Masalah Alat Berat:

Guna mempercepat realisasi proyek investasi, tentunya diperlukan pengadaan alat-alat berat, untuk penyiapan lahan oleh perusahaan. Ternyata yang terjadi di lapangan perusahaan tidak dapat mendatangkan/mengadakan langsung alat-alat berat dimaksud dari luar negeri (Malaysia) yang harganya lebih murah. Untuk maksud tersebut mungkin BKPM mempunyai solusinya.

Peserta Rakornis, para Undangan dan Hadirin sekalian.

Percepatan pertumbuhan investasi tidak hanya didukung oleh pelayanan publik yang prima semata, tetapi juga tergantung pada bagaimana kita dapat mempromosikan, berbagai peluang bisnis dan investasi di berbagai sektor. Di sinilah peranan Bidang Promosi untuk melaksanakan SK Gubernur Nomor 59 Tahun 2008, tanggal 28 Januari 2008, Tentang Agenda Promosi Pemda Kalbar, sehingga kegiatan promosi daerah, dapat dilaksanakan secara terpadu, yang disesuaikan dengan aspek finansial dan kepentingan daerah.

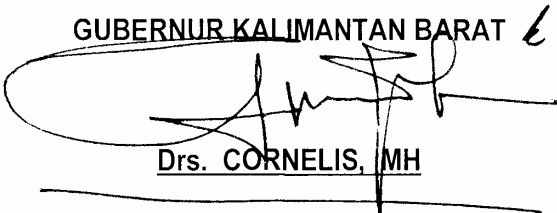
Beberapa kebijakan yang disampaikan tersebut, baik di Bidang Koperasi dan UKM, Kerjasama, Promosi maupun Investasi, hendaknya dapat dijadikan sebagai acuan penetapan kinerja masing-masing dinas /instansi terkait, dengan bertanggung jawab melaksanakan tugas-tugasnya yang dijabarkan melalui berbagai program pembangunan yang lebih rasional, serta berpihak kepada rakyat, yang menghasilkan output dan outcome yang jelas, akuntabel dan transparan.

Hadirin dan undangan yang saya muliakan.

Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Sebelum mengakhiri sambutan ini saya atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, berharap semoga Rakornis Koperasi dan UKM, Kerjasama, Promosi dan Investasi dapat berjalan sukses, aman dan lancar, sehingga menghasilkan kesepakatan atau gagasan yang mampu memperbaiki kinerja masing-masing dinas/instansi terkait.

Akirnya dengan nama Tuhan Yang Maha Kuasa, Rakornis Koperasi dan UKM, Kerjasama, Promosi dan Investasi se-Kalimantan Barat, hari Selasa, tanggal 6 Mei 2008, secara resmi dibuka.

Terima kasih, selamat pagi dan salam sejahtera.

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT   
Drs. CORNELIS, MH